



Media: Republika

Hari: Rabu

Tanggal: 10 Mei 2017

Halaman: 21

Klaim Jamkesda Kota Yogyakarta Baru 20 Persen

● YULIANINGSIH

YOGYAKARTA — Klaim Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) Kota Yogyakarta hingga triwulan pertama 2017 mencapai Rp 4,19 miliar. Jumlah tersebut sekitar 20 persen dari total alokasi Jamkesda Rp 20 miliar pada tahun ini.

"Klaim ini masih terus berlanjut. Itu tercatat hingga triwulan pertama saja," ujar Kepala Seksi Penjaminan dan Peningkatan Mutu Kesehatan Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Yogyakarta Umi Nur Chariyati, Selasa (9/5).

Menurutnya, rumah sakit swasta menjadi pihak yang paling rajin

mengklaimkan Jamkesda. Menurutnya selama ini klaim Jamkesda dari rumah sakit cenderung menumpuk pada akhir tahun. Namun hal itu dinilai tidak mengganggu pelaporan penggunaan anggaran Jamkesda.

"Klaim masih bisa diberi kelonggaran sampai awal tahun. Serapannya naik turun. Adanya Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) BPJS tidak begitu signifikan pengaruh serapannya. Beda saat awal program BPJS dulu memang signifikan pengaruhnya," ujarnya.

Diakui, kepesertaan warga Kota Yogyakarta dalam JKN Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan saat ini sudah mende-

kati 90 persen. Namun masih ada warga yang belum memiliki jaminan kesehatan apapun sehingga diampu Jamkesda.

Dia mencontohkan dari pemegang Kartu Menuju Sehat (KMS) ada sekitar 3.000 yang belum didaftarkan menjadi Peserta Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan. "Rencananya itu akan dimasukkan dalam peserta PBI BPJS Kesehatan. Tapi harus valid masuk pemegang KMS. Yang sudah masuk PBI lama pun tapi tidak masuk KMS tahun ini jaminan PBI akan dicabut," katanya.

Menurutnya, pemerintah Kota Yogyakarta setiap bulan memiliki tanggungan bagi 11.186 PBI BPJS Ke-

sehatan yang dibayarkan dengan APBD Kota Yogyakarta. Realisasi pembayaran PBI BPJS Kesehatan sampai triwulan pertama 2017 sekitar Rp 688 juta.

Dia menyatakan program Jamkesda Kota Yogyakarta akan berakhir pada tahun 2019. Pasalnya, pemerintah pusat memberikan tenggat waktu seluruh warga menjadi peserta JKN BPJS Kesehatan sampai tahun 2019, sehingga semua program jaminan kesehatan dapat terintegrasi.

"Jamkesda ini terakhir tahun 2019. Setelah itu sudah tidak ada Jamkesda. Selanjutnya bagaimana, kami belum bahas sampai ke sana," ujarnya. ■ ed: fernan rahadi

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Kesehatan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 16 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005